



# LAPORAN KEGIATAN

**UN FACTI: Taking Forward FACTI Panel Recommendation on Strengthening Tax Cooperation in Asia-Pacific and Beyond**

**29 April 2021**



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN**  
**Pertemuan Virtual**  
**“UN FACTI: Taking Forward FACTI Panel Recommendation on**  
**Strengthening Tax Cooperation in Asia Pacific and Beyond”**  
**29 April 2021**

## I. PENDAHULUAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Dr. Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai Presiden *South East Asia Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) diundang untuk menjadi pembicara dalam acara regional UN FACTI (Financial Accountability Transparency & Integrity). Acara yang dilangsungkan sejak pukul 14:00 WIB ini mengangkat tema “*Taking Forward FACTI Panel Recommendation on Strengthening Tax Cooperation in Asia Pacific and Beyond.*”

UN FACTI dibentuk pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Sidang Umum PBB yang ke 74 dan 75. Panel ini didirikan untuk dapat berkontribusi membantu negara anggota PBB mengimplementasikan visi ambisius dan transformatif Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. UN FACTI dimandatkan untuk melakukan *review* tantangan dan tren yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan integritas keuangan, dan membuat rekomendasi berdasarkan bukti untuk membantu memperkecil jarak yang ada dalam sistem internasional.

## II. AGENDA ACARA

No	Acara	Keterangan
1.	Pembukaan dan Sambutan selamat datang	Sekretariat FACTI
2.	Presentasi Laporan Panel FACTI	<b>Profesor Shahid Hafiz Kardar</b> , Anggota Panel FACTI Tingkat Tinggi PBB, mantan Gubernur Bank Negara Pakistan dan mantan Menteri Keuangan, Perencanaan, Cukai dan Perpajakan, Industri dan Pengembangan Mineral, Pakistan
3.	Tanggapan dari para pelaku integritas keuangan di Asia Pasifik	<b>Ms. Cynthia Gabriel</b> , Direktur Eksekutif, Pusat Pemberantasan Korupsi dan Kronisme <b>Ms. Lidy Nacpil</b> , Koordinator

		<p>Regional, Gerakan Rakyat Asia tentang Hutang dan Pembangunan</p> <p><b>Mr. Sreedhar Ramamurthi</b>, Managing Trustee, Kepercayaan Lingkungan</p> <p><b>Mr. Robin Ng</b>, Direktur, Divisi Perpajakan dan Hubungan Internasional, Otoritas Pendapatan Pedalaman Singapura *</p> <p><b>Dr. Fadli Zon</b>, Presiden, Anggota Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi; Ketua, Komite Kerja Sama Antar Parlemen, DPR RI</p> <p><b>Ms. Maria Lurdes Martins de Sousa Bessa</b>, Perwakilan dan Pendiri GOPAC Timor Leste Anggota MP, Partido Democratico, Timor Leste</p> <p><b>Ms. Marie Gay Alessandra Ordenes</b>, Direktur Asia Pasifik, Transparansi Industri Ekstraktif Prakarsa</p> <p><b>Mr. John Versantvoort</b>, Kepala Kantor Anti-Korupsi dan Integritas, Pembangunan Asia Bank</p> <p><b>Mr. Francesco Checchi</b>, Penasihat Anti-Korupsi, Asia Tenggara dan Pasifik, Perserikatan Bangsa-Bangsa Kantor Narkoba dan Kejahatan 1</p>
4.	Diskusi dengan moderator, diselenggarakan dalam tiga putaran	
5.	Sambutan dan Penutup	• FACTI Panelis



### III. SITUASI UMUM

Jalannya pertemuan adalah sebagai berikut:

1. **Pembukaan: Jelson Garcia, Koordinator Asia Pacific Financial Integrity** membuka acara dan menyambut kehadiran dan menyampaikan terima kasih kepada para panelis dan peserta yang telah bergabung dalam sesi regional Asia-Pacific UN FACTI. Setelah menerangkan beberapa peraturan diskusi, Jelson Garcia menerangkan bahwa diskusi ini diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan para stakeholder integritas keuangan (*financial integrity*) untuk mendiskusikan bagaimana mengimplementasikan rekomendasi panel FACTI di ASIA Pacific dan sekitarnya, Target dari partisipan dalam diskusi ini adalah *civil society*, parlemen, institusi audit, agensi pengawas, kementerian keuangan, seta institusi keuangan internasional.
2. **Profesor Shahid Hafiz Kardar, anggota UN High Level FACTI Panel, Mantan Gubernur Bank Nasional Pakistan dan Mantan Menteri untuk Keuangan, Perencanaan, Cukai dan Pajak, dan Pembangunan Industri dan Mineral Pakistan** mempresentasikan hasil laporan dan rekomendasi FACTI untuk memperkuat keuangan integritas dan mengatasi terjadinya kejahatan-kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Panel FACTI memiliki mandat untuk melakukan *review* terhadap kerangka institusi dan hukum internasional; mengidentifikasi gap, hambatan, dan kerentanan dalam desain dan implementasi; membuat rekomendasi berdasarkan bukti terkait dengan bagaimana membuat sistem yang lebih komprehensif, kuat, efektif, dan universal; dan mengusulkan cara-cara untuk mengatasi hasil dari temuan-temuan.

Dalam pemaparannya, Prof. Kardar menjelaskan bahwa dengan adanya *illicit financial flows*, situasi ini tentunya merusak kepercayaan publik, menguras sumber daya, mendorong masyarakat ke dalam kemiskinan dan melumpuhkan upaya untuk mengatasi tantangan global, termasuk di dalamnya krisis COVID-19 dan iklim. Diperlukan adanya penguatan integritas dalam keuangan global, sehingga negara dapat lebih baik memberikan kedamaian dan kesejahteraan untuk masyarakat luas saat ini dan di masa yang akan datang, Karena itulah, FACTI mengembangkan *blueprint* untuk dapat membebaskan ekonomi global dari praktik-praktik kejahatan keuangan dan memastikan keberlanjutan pembangunan bagi semua pihak.

Integritas keuangan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan baru yang dibangun oleh FACTI berdasarkan nilai, kebijakan, dan institusi yang dipersatukan dengan satu tujuan. Untuk mencapai integritas keuangan diperlukan adanya transparansi yang lebih besar, memperkuat akuntabilitas, dan lebih banyak kerja sama pada level nasional, regional, dan global.

FACTI dalam laporannya merekomendasikan adanya *global pact* dalam integritas keuangan. Inisiasi ini akan melibatkan semua negara yang menyetujui untuk melakukan aksi komprehensif untuk menciptakan integritas keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, dan menggunakan proses yang dirilis dari aksi-aksi ini untuk menambahkan investasi dalam mencapai SDGs.

Adapun rekomendasi FACTI lainnya adalah dengan meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas, legitimasi, transparansi, dan keadilan; merumuskan kebijakan yang melibatkan para pendukung, *civil society* dan media, pembagian formasi dan kooperasi internasional, peningkatan kapasitas serta dinamisasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Direkomendasikan pula adanya diseminasi dan koleksi data global, lokalisasi mekanisme-mekanisme internasional, serta penerapan implementasi yang efektif. Rekomendasi-rekomendasi ini diturunkan ke dalam 14 unsur dan spesifik aksi.

Prof Kardar memaparkan kesimpulan dari hasil laporan UN FACTI yaitu; Komunitas internasional sudah seharusnya melakukan reformasi, mendesain ulang, dan merevitalisasi arsitektur global untuk melawan *illicit financial flows* dengan pandangan integritas keuangan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada intinya, rekomendasi FACTI harus dilakukan dengan tetap berdasarkan pada prinsip mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk semua, dan dimanapun.

3. **Sesi Diskusi: Cynthia Gabriel, Direktur Eksekutif Center to Combat Corruption and Cronyism** menerangkan bahwa kerangka hukum internasional tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Perlu adanya diskusi yang dilakukan secara terus menerus untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu yang diambil, serta untuk mendapat dukungan politik dari pihak-pihak penting yang terkait, khususnya pihak-pihak negara anggota.

Pelibatan semua pihak juga harus menjadi prioritas karena hal ini akan menyangkut dengan hasil kualitas kerangka yang dihasilkan, agar kerangka tersebut dapat diterima dan diaplikasikan bagi seluruh negara-negara anggota. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas tetap harus diperkuat dan sangat menyetujui rekomendasi nilai-nilai FACTI karena hal tersebut merupakan fondasi yang penting untuk dapat bersama-sama memberantas praktik-praktik kejahatan keuangan.

4. **Lydi Nacpil, Koordinator Regional, Asia Pacific Movement on Debt and Development** menegaskan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan merupakan permasalahan terbesar yang perlu diatasi. Beberapa proposal yang senada dengan rekomendasi FACTI telah disampaikan oleh beberapa organisasi internasional, maupun *civil society* lainnya. Namun, proposal yang memiliki tujuan untuk mengatasi terjadinya tindak-tindak kejahatan keuangan tersebut diblokir oleh para pemerintah, walaupun mereka setuju pada saat rapat, pada praktiknya tidak mereka implementasikan.

Solidaritas internasional dan aksi masyarakat merupakan hal yang sangat diperlukan tidak hanya dalam memberantas kejahatan-kejahatan keuangan, melainkan juga dalam beberapa perjuangan dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan, ekonomi, maupun iklim yang semakin intensif dan meningkat.

Membangun *political will* atau komitmen politik dari para pemerintah untuk memberantas *illicit financial flows* merupakan hal yang harus diprioritaskan. Dengan tidak adanya komitmen politik, maka proposal-proposal yang sangat inovatif dari FACTI ini akan terhenti begitu saja. Diperlukan negosiasi dan kerja sama antar organisasi internasional serta *civil society* untuk dapat memberikan tekanan bagi para pemerintah untuk tersadar akan pentingnya isu ini sehingga mereka dapat segera mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi spesifik yang telah FACTI tulis secara rinci dalam laporannya.

5. **Sreedhar Ramamurthi, Managing Trustee Environics Trust** menegaskan bahwa sumber daya yang hilang akibat *illicit financial flows*, penambangan ilegal,

*tax heavens*, tidak hanya hilang pada saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa diraih tanpa adanya keinginan untuk menangani isu kesetaraan. Pandemi yang terjadi saat ini telah memperburuk kesenjangan sosial yang ada. Kekayaan perusahaan memiliki perbedaan dan perkembangan secara pesat di saat orang miskin yang membayar biayanya. Untuk menangani permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, dibutuhkan adanya *political will* yang kuat untuk dapat menerapkan rekomendasi-rekomendasi FACTI untuk dapat memperkecil gap dan membangun integritas keuangan demi pembangunan berkelanjutan.

6. **Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI, Presiden SEAPAC** menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan pandangan parlemen terkait isu kejahatan keuangan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Presiden SEAPAC menegaskan bahwa anggota parlemen memiliki peran yang penting dan mendasar dalam pemberantasan *illicit financial flows*. Oleh karena itu, peran penting parlemen tersebut harus diakui dan parlemen harus dilibatkan dalam proses pembentukan kerangka-kerangka atau mekanisme internasional dan nasional pemberantasan kejahatan keuangan tersebut. Fungsi legislasi anggota parlemen dapat memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangkal praktik-praktik kejahatan keuangan. Peran pengawasan parlemen juga menjaga agar praktik-praktik integritas keuangan dapat ditegakkan.



Dr. Zon menyampaikan bahwa integritas keuangan merupakan hal mendasar yang diperlukan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa menegakkan nilai-nilai integritas keuangan seperti akuntabilitas, transparansi, legitimasi, dan keadilan, bermiliar-miliar uang yang dapat dijadikan dana pembangunan atau investasi akan hilang begitu saja karena dipergunakan oleh para koruptor. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat luas.

Oleh karenanya, ia mendorong adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan parlemen untuk dapat menerjemahkan mekanisme-mekanisme global pemberantasan kejahatan keuangan ke dalam konteks nasional.

Dibutuhkan pula wadah dimana parlemen, masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dapat berbagi *best practices*, peningkatan kapasitas, dan melakukan advokasi untuk mengatasi permasalahan korupsi keuangan ini. Kooperasi dan kerjasama menangani *money-laundering, tax evasion, asset recovery* perlu pula digalakkan. Dr. Zon mencontohkan *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* dan *ASEAN Forum on Taxation* sebagai jaringan-jaringan yang bisa dikembangkan untuk mengatasi *illicit financial flows*.

Dr. Fadli Zon mengapresiasi atas pekerjaan yang telah FACTI lakukan dan menyambut kolaborasi dengan SEAPAC untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas keuangan demi kepentingan masyarakat luas.

7. **John Versantvoort, Kepala Kantor Anti-Corruption and Integrity Asian Development Bank** menyorot dari sisi apa yang bisa dilakukan, terutama dari organisasi ADB ke depannya untuk mengatasi dan memberantas *illicit financial flows*. Harus diperhatikan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk dapat mengisi celah-celah yang ada dalam mekanisme internasional untuk memberantas kejahatan keuangan saat ini.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran oleh semua pihak akan pentingnya isu kejahatan keuangan ini. Dengan meningkatnya tingkat kesadaran, hal ini tentu akan mempermudah perjalanan perumusan-perumusan regulasi maupun mekanisme internasional mengenai isu ini. Selain itu, hal yang paling penting yang harus didapatkan adalah komitmen politik. Tanpa adanya komitmen tersebut, progres yang telah luar biasa ini akan terhenti begitu saja, dan tidak bisa memiliki perkembangan yang signifikan.

8. **Marie Gay Alessandra Ordenes, Direktur Asia Pacific Extractive Industry Transparency Initiative** mengemukakan bahwa satu diantara lima kejahatan transnasional pasti berhubungan dengan industri ekstraktif. Oleh karena itu diperlukan adanya perhatian terhadap industri ini untuk dapat menghindarkan



dari kesempatan-kesempatan praktik kejahatan keuangan yang sangat rentan untuk dapat terjadi. 20% kasus *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) berelasi dengan industri ekstraktif. Oleh karena itu, *beneficial ownership* perlu dipromosikan untuk memperkuat transparansi.

9. **Fransesco Checchi, Penasehat Anti Korupsi UNODC Southeast Asia and the Pacific** mengapresiasi laporan dan rekomendasi yang telah FACTI buat untuk meningkatkan nilai-nilai integritas keuangan. Diharapkan ke depannya rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh FACTI dapat dijadikan pedoman untuk menjadi aturan-aturan dasar kerangka untuk mencegah dan memberantas *illicit financial flows*.
10. **Penutup: Dr. Fadli Zon** meminta izin undur diri terlebih dahulu dikarenakan adanya rapat dan agenda yang lain. Oleh karena tidak bisa hadir pada sesi diskusi pertanyaan dan jawaban, Dr. Zon membuka kesempatan bagi para peserta jika menginginkan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi lebih lanjut, termasuk pertanyaan-pertanyaan terkait melalui email [seapac@dpr.go.id](mailto:seapac@dpr.go.id).

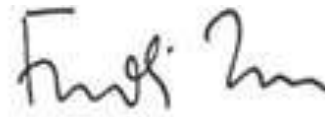


#### **IV. PENUTUP**

Demikianlah pokok-pokok laporan pertemuan virtual UN FACTI pada tanggal 29 April 2021. Dokumen terkait terlampir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jakarta, 6 Mei 2021

Ketua Badan Kerja Sama  
Antar Parlemen,



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

A-86

# LAMPIRAN

## **Speech President SEAPAC, Hon. Dr. Fadli Zon Parliamentarians' role in combating Illicit financial flows**

**Distinguished Panelists and Participants,**

**Assalamualaikum Wr, Wb.  
Peace be upon us all,**

On behalf of the South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) allow me to extend my gratitude to FACTI for having me speak on this panel. It is indeed an important topic that we need to continually discuss and I hope this forum would be a momentum for us to foster a common ground to tackle corruption through financial integrity initiatives.

**Ladies and Gentleman,**

Financial Integrity is essential in creating a sustainable environment. When we could successfully implement policies based on the principle of financial integrity, the 2030 agenda can be easily achieved. Thus, we must strengthen transparency, enhance accountability, uphold

integrity, and promote cooperation at all levels to build strong financial integrity.

The growing conversation of international cooperation to combat illicit financial flows has demonstrated the deep commitment to tackling the problem. The Addis Ababa Action Agenda highlighted a range of recommendations and commitments to address the challenge of financing and creating an enabling environment for sustainable development. The UN Resolution Adopted by the General Assembly 72/207 and 73/222 promotes international cooperation to combat illicit financial flows to foster sustainable development.

On that note, I would like to convey my great appreciation for the works that have been done by FACTI, particularly on its recommendation in advancing financial integrity initiatives as well as its proposition to establish a global pact for financial integrity. I welcome and support these wonderful initiatives and believe that they will provide a principal mechanism to build a system of financial integrity and encourage more cooperation to combat illicit financial flows at all levels.

Furthermore, I also want to encourage government authorities, civil society networks, particularly

FACTI, to also involve parliaments in building practical cooperation to tackle the problem of illicit financial flows.

### **Distinguished participants,**

The effort to reduce illegal financial activities and strengthen the financial integrity has been growing over the past few years in the South East Asia region.

On tax matters, most South East Asia countries have bilateral tax treaties to reduce the risk of tax evasion and ensure the fair allocation of tax revenues. Although there is no region-based tax treaty yet, ASEAN Forum on Taxation provides a platform for cooperation among member states and serves as a framework to share information and ongoing dialogue to prevent tax illegal activities within the region.

The legal framework to combat money laundering and other cross-border financial crimes regulated in the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance. The treaty intended to improve effectiveness in the prevention, investigation, and prosecution of offenses through legal cooperation among South East Asia countries.

However, the implementation of the treaty is not as easy as it seems due to the difference in national policies and the political dynamics of the member states.

Most parliaments in the South East Asia region established the Public Account Committee to strengthen their public financial oversight mechanism. Through this committee, parliamentarians monitor and review the effectiveness of government spending. Ideally, the PAC should work hand-in-hand with the Supreme Audit Institution and other related government stakeholders, as they have a common ground to prevent misuse of budget funds and increase the transparency of public finance.

### **Ladies and Gentleman,**

Regardless of the progress that has been made, we have to admit that there are still challenges ahead. I would like to outline several points on what more can be done to promote international cooperation to combat illicit financial flows, as well as strengthen parliamentary roles in achieving this agenda.

**First**, we must recognize the important role of parliaments to curb illicit financial flows. Through its legislative functions, parliamentarians must provide a comprehensive legal framework to avoid any loopholes which may become the practice of financial crimes. Parliamentarians' oversight also needs to be strengthened to uphold the practice of financial integrity. Therefore, parliaments should always be involved in the discussion making of national, regional, and international financial integrity instruments.

**Second**, parliament and government authorities must work together to translate the global instruments to the local context as well as instilling the values of financial integrity (Accountability, transparency, legitimacy, and fairness) in policy-making to combat illicit financial flows. It is necessary to harmonize these instruments to make them applicable and works effectively to achieve sustainable development.

**Third**, build a network where government, parliament, civil society, academician, and other relevant stakeholders could share best practices, increase their capacity building, and also conduct



advocacy to tackle these financial corruption problems. FACTI's Global Compact initiative that aims to foster financial integrity for sustainable development could be developed to fit the needs of this network.

### **Distinguished Participants,**

Since its inception in 2005, the South East Asia Parliamentarians Against Corruption have been actively involved in the regional and global anti-corruption network, while at the same time fostering a strong anti-corruption partnership among parliamentarians. Our membership is growing to more than 80 parliamentarians across seven countries, with at least four national chapters in Indonesia, Malaysia, Cambodia, and Timor-Leste.

SEAPAC will continue to foster anti-corruption and good governance cooperation. We open to collaborate and look forward in working together to improve institutional capacity and uphold the values of financial integrity for the benefit of all people.

Thank you.

***Wassalamualaikum Wr., Wb.***



## Financial Accountability Transparency & Integrity Regional Event

*Taking Forward FACTI Panel Recommendation on Strengthening Tax Cooperation in Asia Pacific and Beyond*  
29 April 2021

### RILIS MEDIA

#### **Presiden SEAPAC Menegaskan Pentingnya Peran Parlemen dalam Memberantas *Illicit Financial Flows***

Presiden *South East Asia Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Dr. Fadli Zon menegaskan pentingnya peran parlemen dalam pemberantasan *illicit financial flows*.

Pesan tersebut disampaikan Dr. Fadli Zon saat menjadi pembicara UN *Financial Accountability Transparency & Integrity* (FACTI) yang mengangkat tema "*Taking Forward FACTI Panel Recommendation on Strengthening Tax Cooperation in Asia Pacific and Beyond*" pada hari Kamis, 29 April 2021.

"Peran penting parlemen dalam menyelesaikan kejahatan keuangan harus diakui. Fungsi legislasi anggota parlemen dapat memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangkal praktek-praktek kejahatan keuangan. Peran pengawasan parlemen juga menjaga agar praktik-praktik integritas keuangan dapat ditegakkan," ujar Ketua BKSAP DPR RI tersebut.

Integritas Keuangan merupakan hal mendasar yang diperlukan demi terjapainya pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa menegakkan nilai-nilai integritas keuangan seperti akuntabilitas, transparansi, legitimasi, dan keadilan, bermilyar-milyar uang yang dapat dijadikan dana pembangunan atau investasi akan hilang begitu saja karena dipergunakan oleh para koruptor. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat luas.

Oleh karenanya, ia mendorong adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan parlemen untuk dapat menerjemahkan mekanisme-mekanisme global pemberantasan kejahatan keuangan ke dalam konteks nasional.

Dibutuhkan pula wadah dimana parlemen, masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dapat berbagi best practices, peningkatan kapasitas, dan melakukan advokasi untuk mengatasi permasalahan korupsi keuangan ini. Kooperasi dan kerjasama menangani *money-laundering, tax evasion, asset recovery*, dan kejahatan keuangan lainnya perlu pula digalakkan. Dr. Zon mencontohkan ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance dan ASEAN Forum on Taxation sebagai jaringan-jaringan yang bisa dikembangkan untuk mengatasi perpindahan dana ilegal.

Dr. Fadli Zon mengapresiasi atas pekerjaan yang telah FACTI lakukan dan menyambut kolaborasi dengan SEAPAC untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas keuangan demi kepentingan masyarakat luas.



## **Financial Accountability Transparency & Integrity Regional Event**

*Taking Forward FACTI Panel Recommendation on Strengthening Tax Cooperation in Asia Pacific and Beyond*

29 April 2021

FACTI dibentuk pada *UN High-Level Panel on Financial Accountability* tanggal 2 Maret 2020. Pendirian UN FACTI ini ditujukan agar para negara anggota dapat mengimplementasikan ambisi dan visi 2030 Agenda Sustainable Development yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan integritas keuangan, dan untuk membuat rekomendasi berdasarkan bukti untuk dapat mempersecil jarak yang ada di sistem internasional saat ini.

Seminar yang diikuti Presiden SEAPAC ini menyatukan para ahli integritas keuangan untuk berdiskusi bagaimana mengimplementasikan rekomendasi UN FACTI Panel untuk membentuk koorperasi internasional yang lebih kuat dalam pemberantasan illicit financial flows. Acara ini juga menghadirkan beberapa aktor integritas terkemuka sebagai pembicara, antara lain; Prof. Shahid Hafiz Kardar (UN High-Level FACTI Panel Member), Mr. Fransesco Checchi (UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Adviser), Mr. John Versantvoort (Head of Office of the Anti-Corruption and Integrity Asian Development Bank), Mrs. Chyntia Gabriel (Executive Director of Center to Combat Corruption and Cronyism), Mrs. Marie Gay Alessandra Ordenes (Asia Pacific Director Extractive Industry Transparency Initiative), Mr. Sreedhar Ramamurthi, Managing Trustee (Environics Trust), dan Mrs. Lidy Nacpil (Regional Coordinator, Asia Pacific Movement on Debt and Development).



## Taking Forward FACTI Panel Recommendation On Strengthening Tax Cooperation in Asia Pacific and Beyond

*A regional virtual event hosted by FACTI Panel Secretariat*

*April 29, 2021, 15:00 Manila, 12:30 Delhi ● Registration required: [Link](#).*

### Background

The UN's High Level Panel on Financial Accountability, Transparency and Integrity (FACTI) released its [report](#) on February 25, 2021 that tackled the skewed global finance which obstructs the achievement of the 2030 Agenda. Formed in March 2020 by the President of the UN General Assembly and the President of ECOSOC, the Panel explored further actions the international community may need to address the gaps and impediments in combatting illicit financial flows.

The report highlights how resources drained by corruption, money laundering and tax abuses are in an unfathomable scale. For ordinary citizens, they stand to lose \$20-40 billion in bribes received by public officials in developing and transitioning countries, \$1.6 trillion or 2.7% of global GDP is lost in money laundering by criminals, including drug traffickers and organized crime while 10% of the world GDP may be held in offshore financial assets.

If regained, such vast resources could help Asia fund the gaps to achieve the region's SDG that needs \$1.5 trillion (or 5 per cent of GDP). They could provide significant contribution to the \$669 billion worth of social protection that has targeted cash transfer for the poor, nutritious food, quality education and universal healthcare systems. They could also reduce the population, estimated at 132 million people, being pushed into extreme poverty in South Asia alone due in part to COVID-19.

The Panel also found that countries can prevent the drain of development resources and reduce public resource shortfall to recover from global health and economic crises through systemic solutions. This is reflected in its 14 recommendations, representing ambitious measures to reform, redesign and revitalize values, policies and institutions that can effectively foster financial integrity for sustainable development.

Shoring up systemic response against tax base erosion and ensuring a fair allocation of tax revenues are highly critical to build back better. However, [UNESCAP's 2019 Report](#) underscores that "Asia and the Pacific is not yet fully prepared for broad-based regional tax cooperation. To date such efforts have been limited mainly to the subregional level, with existing tax cooperation platforms constrained by inadequate capacity and funding, and broader collaboration among them minimal. There is significant room for strengthened regional tax cooperation to better support developing countries and contribute to global tax cooperation and reform initiatives."

FACTI recognizes that for over 10 years, concerted actions developed where several resource-rich countries moved their EITI standard compliance to policy reforms. Meanwhile, some Asian governments have rolled out their OGP Action Plans that deal with anti-corruption and fiscal openness. These efforts complement some of the countries' commitments to the implementation of multilateral mechanisms such as the UN Conventions Against Corruption (UNCAC), Financial Action Task Force (FATF) standards, the Global Forum

on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, and the BEPS Inclusive Framework. Enacting these commitments also entails new legislations or leveraging existing policies.

Increasingly, the stakeholders of such initiatives underscore the growing demand for evidence that they are effective in recovering stolen assets, countering multiple forms of financial crimes, and enabling an increased domestic resource mobilization. More importantly, the gaps and impediments they face to scale up such initiatives reinforce [FACTI Panel's call](#) for a stronger international cooperation to combat illicit financial flows and in coming up with a roadmap for countries to adopt in their context.

### **Purpose**

The regional event brings together financial integrity actors to discuss how to implement FACTI Panel recommendations in Asia Pacific and beyond. Specifically, the participants will tackle the following:

- How important are FACTI's recommendations in advancing financial integrity initiatives, especially on regional to global tax cooperation in Asia Pacific?
- What can be learned from the governments' implementation of their international commitments and multilateral mechanisms in curbing illicit cross border financial flows and furthering international cooperation?
- What would it take to implement FACTI Panel's proposed Global Compact for financial integrity that builds on the strengths and critical lessons from the existing initiatives in the region?
- How critical are the roles of civil society, the private sector, and the international community in moving FACTI's ambitious set of measures to reform and revitalize financial integrity solutions?

### **Event highlights**

- The target participants are financial integrity actors in the region representing civil society networks; parliament; audit institutions, oversight agencies, and finance ministries of the government; and international financial institutions. The virtual event will run for 1 hour and 45 minutes. It will be recorded. Registration is required. Participants are encouraged to send questions or signify their intent to make interventions beforehand.

### **Proposed programme**

Welcome remarks and overview

- FACTI Secretariat
1. Presentation of the FACTI Panel Report
    - Professor Shahid Hafiz Kardar, UN High Level FACTI Panel Member, former Governor of the State Bank of Pakistan and former Minister for Finance, Planning, Excise and Taxation, Industries and Mineral Development, Pakistan
  2. Responses from financial integrity actors in Asia Pacific
    - Ms. Cynthia Gabriel, Executive Director, Center to Combat Corruption and Cronyism
    - Ms. Lidy Nacpil, Regional Coordinator, Asia Peoples' Movement on Debt and Development
    - Mr. Sreedhar Ramamurthi, Managing Trustee, Envirionics Trust
    - Mr. Robin Ng, Director, International Tax and Relations Division, Inland Revenue Authority of Singapore\*
    - Dr. Fadli Zon, President, Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption; Chairman, Committee for Inter-Parliamentary Cooperation, Indonesia House of Representatives
    - Ms. Maria Lurdes Martins de Sousa Bessa, GOPAC Timor Leste Representative and Founding MP Member, Partido Democratico, Timor Leste

- Ms. Marie Gay Alessandra Ordenes, Asia Pacific Director, Extractive Industry Transparency Initiative
  - Mr. John Versantvoort, Head of Office of the Anti-Corruption and Integrity, Asian Development Bank
  - Mr. Francesco Checchi, Anti-Corruption Adviser, Southeast Asia and the Pacific, United Nations Office on Drugs and Crime<sup>1</sup>
3. A moderated discussion, organized in three rounds
  4. Wrap up and closing Remarks
    - FACTI Panelist

---

<sup>1</sup> \* To be confirmed